

# EVALUASI PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MADIUN

Lion Luthfi Berliansyah

NPP. 29.0952

Asdaf Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: lionluthfi23@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** This research was conducted based on transportation problems that occurred in the field regarding motor vehicle testing or better known to the public as the KIR Test. The reality that occurs in the field is that there are still people who have not warned about the importance of roadworthiness for the vehicles they drive. In addition, Madiun Regency itself has roads that are used as the main road that connects between provinces and the increasing number of motorized vehicles every year. The purpose of this study is to find out the evaluation of the motor vehicle testing policy at the Madiun Regency Transportation Office. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. In data collection, the authors used interview, observation and documentation techniques. Data analysis in this study in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The findings processed by the authors of this study are that motor vehicle testing has a positive influence on both the environment and the community in the transportation sector. Vehicle testing in Madiun Regency already has various innovations used to facilitate the running of testing and also the implementation of new systems, but there are still shortcomings, especially in the resource of its employees. **Conclusion:** Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Evaluation of Motor Vehicle Testing in Madiun Regency has gone well when viewed on the dimensions of effectiveness, leveling and responsiveness, where the Madiun Regency Transportation Office is able to meet the testing target, has innovations that can be used to facilitate and speed up the testing process and a new procedure system, namely the drive thru. However, there are still obstacles experienced in the dimensions of efficiency, effectiveness and accuracy. The obstacles experienced in the number of employee human resources are still lacking, the time needed to complete the testing stages, obstacles to the implementation of new systems and applications and the absence of other testing UPTDs in Madiun Regency.

**Keywords:** Effectiveness, Transportation, Motor Vehicle Testing (KIR Test)

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan transportasi yang terjadi dilapangan mengenai pengujian kendaraan bermotor atau lebih dikenal masyarakat dengan Uji KIR. Kenyataan yang terjadi dilapangan masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya kelayakan jalan bagi kendaraan yang mereka kendarai. Selain itu Kabupaten Madiun sendiri memiliki jalanan yang digunakan sebagai jalan utama yang menghubungkan antar lintas provinsi serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. **Metode** penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dari penelitian ini yaitu pengujian kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat terutana pada bidang transportasi. Pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun sudah memiliki berbagai inovasi yang digunakan untuk mempermudah jalannya pengujian dan juga penerapan sistem baru akan tetapi masih terdapat kekurangann terutama pada bagin sumber daya pegawainya. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi PengujianP Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik apabila dilihat pada dimensi efektivitas, perataan dan responsivitas, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mampu memenuhi target pengujian, memiliki inovasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengujian serta sitem prosedur baru yaitu drive thru. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dialami pada dimensi efesiensi, efektivitas dan ketepatan. Kendala yang dialami pada jumlah SDM Pegawai yang masih kurang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan pengujian, kendala pada penerapan sistem baru dan aplikasi serta belum adanya UPTD pengujian lain di Kabupaten Madiun.

**Kata kunci:** Efektivitas, Transportasi, Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR)

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan transportasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Menurut Miro (2005) Transportasi merupakan suatu usaha untuk melakukan pergerakan, pengangkutan, pengalihan serta pemindahan objek dari suatu tempat menuju ketempat lain. Pada umumnya sistem transportasi dapat menunjukkan kualitas dari suatu negara serta kemajuan bangsanya. Hal itu menjadikan sektor transportasi harus terus dijaga dan selalu ditingkatkan pada suatu negara. Saat ini Indonesia sudah memiliki MRT, LRT dan Commuter Line, akan tetapi hal tersebut dirasa masih belum merata keseluruh penjuru Nusantara. Sistem transportasi di Indonesia sendiri berada pada peringkat 66 dari 140 negara di dunia menurut laporan *Travel And Tourism Competitiveness 2019* oleh *World Economic Forum*. Berdasarkan survei yang dilakukan Worldometer pada tahun 2020 Indonesia berada pada posisi nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak didunia. Tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 276.543.274 jiwa, hal ini menjadikan penduduk Indonesia setara dengan 3,51% dari total seluruh penduduk di dunia (sumber: kompas.com). Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, penggunaan sarana transportasi darat dirasakan sangat penting didalam menunjang kegiatan perekonomian, kebudayaan dan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam memudahkan perpindahan orang serta barang pada suatu tempat menuju tempat lainnya dalam waktu yang cepat, efektif serta efisien.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bidang transportasi publik. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan serta keefektifan dalam bidang transportasi yang merupakan bagian kebutuhan pada masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana didalamnya menyangkut mengenai pelaksanaan ketertertiban berlalu lintas. Kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya wajib untuk memenuhi syarat dan kelayakan jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan disebutkan jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melaksanakan uji berkala hanya diterapkan pada kendaraan bermotor jenis angkutan. Menurut Badan Pusat Statiska (BPS) pada tahun 2020 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor jenis angkutan bus dan truk terbanyak nomor satu di Indonesia. Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Provinsi Jawa Timur. Adanya kebijakan mengenai desentralisasi membuat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun dilaksanakan pada Dinas Perhubungan sebagai instansi pelaksana pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun meliputi: Uji Pertama, Penilaian Teknis Kendaraan, Uji Berkala, Mutasi Uji Keluar, Numpang Uji Masuk, Mutasi Uji Masuk dan Numpang Uji Keluar. Pengujian Kendaraan ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah sebagai penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada bidang transportasi.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penggunaan sarana transportasi di Indonesia khususnya kendaraan bermotor disamping memiliki fungsi yang penting juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan. Penggunaan kendaraan bermotor merupakan pemberi kontribusi utama padatnya lalu lintas di jalan raya. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti meningkatkan polusi udara, mempengaruhi kesehatan pernapasan, meningkatkan angka kematian yang disebabkan karena kecelakaan di jalan raya, serta berkontribusi dalam peningkatan gas rumah kaca. Pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pengujian kendaraan Bermotor atau lebih dikenal dengan UJI KIR merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang menyangkut bidang transportasi.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun juga tidak terlepas dari adanya permasalahan. Hal ini terlihat dari adanya hambatan yang menjadi kendala saat ini pada jumlah tenaga penguji, dimana kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji yang memiliki kompetensi penguji di Kabupaten Madiun menjadi suatu kendala tersendiri. Tingkat Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun juga masih kurang. Dalam hal ini kekurangan masyarakat terdapat pada masih belum mengertinya tentang arti keselamatan dan kegunaan dari dilakukannya pengujian kendaraan bermotor. Hal ini merupakan masalah yang dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia, mengingat kelayakan kendaraan merupakan salah satu faktor penting dalam berkendara. Posisi jalan di Kabupaten Madiun merupakan jalan lintas nasional yang menghubungkan 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, hal tersebut membuat jalanan di Kabupaten Madiun menjadi ramai dan padat akan pengguna kendaraan bermotor, truk hingga bus lintas provinsi. Ruas jalan Raya Madiun-Surabaya menjadi salah satu lokasi rawan kecelakaan yang ada di Madiun. Tak jarang kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Madiun selain disebabkan karena faktor kelalaian pengemudi juga dari faktor kelayakan dari kendaraan tersebut. Hal ini sering menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat, dimana masyarakat sering mempertanyakan kelayakan berkendara dari kendaraan tersebut, hal ini tak mengherankan karena masih banyaknya pengemudi yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan uji kelayakan sesuai dengan uji kendaraan bermotor namun masih tetap beroperasi di jalan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks yang menyangkut administrasi, maupun kebijakan pemerintah dalam hal pengujian kendaraan bermotor. Penelitian Luki dan Giffary dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang (Luki Natika dan Giffary Nursyah Putri, 2021), menemukan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya jumlah petugas, banyaknya jumlah kendaraan yang melakukan pengujian, prosedur yang diterapkan, serta peralatan yang digunakan. Penelitian oleh Ike dan Dine (Ike Ravhmawati dan Dine Megawati, 2020) mengemukakan bahwa pengujian kendaraan bermotor mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dalam penerapan kebijakan pengujian kendaraan ini perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan kepada masyarakat dalam kepemilikan buku uji guna tercapainya pencapaian tujuan yang maksimal. Penelitian selanjutnya oleh Harits Haffid yang memiliki kaitan dengan peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan, diketahui bahwa proses pengujian kendaraan dapat berjalan dengan lancar jika dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pelayanan yang baik serta sarana prasarana mencukupi serta selalu mengukur sejauh mana kinerja para pegawai untuk dilakukan evaluasi (Harits Haffid, 2017). Penelitian Suriyani dkk mengemukakan bahwa pengujian kendaraan dilakukan untuk menguji dan memeriksa kendaraan secara teknis dan administrasi agar layak digunakan adapun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diantaranya yaitu faktor kesadaran, faktor sistem, prosedur dan metode, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan dan keterampilan serta faktor sarana pelayanan (Suriyani dkk, 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Noviana dan Munawa Noor yang menjelaskan bahwa pelayanan yang baik dalam pengujian kendaraan bermotor dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang mendukung, disposisi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta struktur birokrasi yang baik (Noviana dan Munawa Noor, 2021)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana lokus penelitian yang dilakukan penulis berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dengan fokus evaluasi pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun. Penelitian yang penulis lakukan juga dilaksanakan pada saat pandemic Covid-19 sehingga terdapat keterbaruan pada kebijakan pengujian kendaraan, disamping itu metode yang digunakan juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Selain itu indikator yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada Teori Evaluasi oleh William N Dunn (2004) yang terdapat 6 dimensi didalamnya yaitu dimensi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penggunaan teori ini nantinya akan membuat pembahasan mengenai evaluasi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun lebih dapat dibahas dengan baik.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari adanya pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan evaluasi pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data secara induktif. Sugiyono (2013:7) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dipakai meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data memiliki sifat induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih mengarah kepada makna dari pada generalisasi.

Penulis mengumpulkan kelengkapan data mengenai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Seksi Manajemen Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Tim Penguji Kendaraan, serta 10 orang masyarakat yang sedang melaksanakan pengujian. Observasi dilakukan dengan partisipasi moderat, menurut Sugiyono (2011:227) Partisipatif moderat, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan observasi partisipatif akan tetapi tidak menyeluruh, hal ini dikarenakan dibutuhkan keahlian khusus dalam pengujian kendaraan bermotor. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan tiga tahapan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:249) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun dengan menggunakan teori evaluasi William N Dunn, dimana terdapat 6 dimensi didalamnya yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Adapun pembahasan dari setiap dimensi tersebut dapat dilihat pada subbab berikut:

### 3.1. Efektivitas

Dimensi Efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, apakah sudah terpenuhi atau belum. Adapun indikator yang akan dianalisis pada dimensi efektivitas ini adalah pencapaian target pengujian kendaraan bermotor dan pengaruh pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) yang dilakukan di Kabupaten Madiun berada pada gedung pengujian kendaraan yang memiliki tempat berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) di Kabupaten Madiun memiliki dua target yaitu memberikan peningkatan angka keselamatan dalam berlalu lintas dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi dari pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa inovasi untuk mempermudah serta mempercepat tahapan pengujian hal ini mengingat jumlah kendaraan yang melakukan pengujian terus bertambah setiap tahunnya serta untuk memenuhi jumlah target yang ditetapkan seperti uji coba sistem drive thru, pembuatan aplikasi, bekerjasama dengan pihak ketiga serta pembuatan website. Target pemenuhan jumlah kendaraan telah mampu direalisasikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian

No.	Jenis Kendaraan	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang	6	8	5
2	Bus	306	419	322
3	Mobil Barang	5544	6689	6301
4	Kereta Gandengan	17	22	16
5	Mobil Tempelan	4	7	2
6	Mobil Khusus	58	123	27
<b>Jumlah</b>		<b>6541</b>	<b>8168</b>	<b>6673</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

Terdapat penurunan jumlah pengujian kendaraan akibat adanya penutupan sementara pada tempat pengujian yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi jumlah pelaksanaan pengujian yang dilakukan di Kabupaten Madiun lebih banyak dari pada jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini dapat menunjukkan bahwa disamping pengujian kendaraan yang dilakukan selama 6 bulan sekali, juga terdapat kendaraan penumpang yang berasal dari luar Kabupaten Madiun yang melakukan pengujian di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Sedangkan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target dan realisasi PAD dari hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun

Tahun	Target	Realisasi
2019	501.400.000,	571.200.000
2020	309.515.000	460.500.000
2021	442.000.000	320.750.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Pengujian kendaraan bermotor mampu memberikan retribusi bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Madiun. Jumlah retribusi mampu dipenuhi bahkan melebihi dari target yang telah

ditentukan, akan tetapi adanya lonjakan angka positif virus corona yang terjadi menyebabkan penutupan pada tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor hal ini berdampak pada hasil retribusi yang tidak dapat memenuhi target pada tahun 2021.

Berdasarkan pembahasan dari kedua indikator pada dimensi efektifitas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan baik dari hasil retribusi pendapatan asli daerah (PAD) maupun target jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

### **3.2. Efisiensi**

Efisiensi memiliki pengertian seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, ukuran yang digunakan dalam dimensi ini ialah efisiensi sumber daya yang diberdayakan dalam melaksanakan kebijakan. Adapun indikator dalam dimensi ini adalah Pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) pegawai dan pendayagunaan sumber daya dalam pelaksanaan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun memiliki 12 pegawai, dimana didalamnya terdapat 6 orang penguji serta 2 orang yang berada di bagian loket pendaftaran pengujian, sedangkan sisanya adalah staf dan tenaga honorer. Hasil dari observasi penulis melihat sumber daya pegawai yang berada pada bagian pengujian dan pendaftaran pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun masih minim. Hal ini dapat terlihat dengan kurang cepatnya proses pendaftaran pengujian kendaraan. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai terutama pegawai penguji teknis kendaraan, dimana satu orang penguji memegang 2 sampai 3 alat pengujian. Kurangnya jumlah pegawai ini mengakibatkan adanya penambahan waktu yang dikarenakan bertambahnya volume kendaraan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan membutuhkan peralatan teknis dalam prosesnya. Dinas perhubungan Kabupaten Madiun memiliki alat-alat pengujian yang digunakan oleh penguji untuk mendukung kebijakan terkait pengujian kendaraan. Peralatan yang berada pada tempat pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun telah melengkapi peralat pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua peralatan yang digunakan untuk pengujian dalam kondisi berfungsi. Penggunaan peralatan pengujian selalu rutin dilakukan kalibrasi selama satu tahun sekali sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP.1945/AJ502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan dua pembahasan indikator diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun pada dimensi efisiensi belum efisien. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah pegawai yang berada pada tempat pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun terutama pada jumlah pegawai penguji. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambat waktu dalam penyelesaian keseluruhan tahap pengujian apabila volume kendaraan yang melakukan pengujian banyak.

### **3.3. Kecukupan**

Dimensi kecukupan berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi sejauh mana alternative yang dibuat mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun indikator pada dimensi kecukupan ini adalah tingkat kesadaran masyarakat dan prosedur pelaksanaan pengujian.

Kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk membantu mencapai keberhasilan dari adanya kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Berbagai program telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun untuk memperbaiki pelayanan, mempermudah prosedur serta meningkatkan kesadaran masyarakat supaya melakukan pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taryono selaku Kepala Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada hari Jum'at 14 Januari 2022 menyatakan bahwa, "Terdapat kekurangan pada tingkat kesadaran

masyarakat untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun, masih banyak masyarakat yang berpemikiran bahwa pelaksanaan pengujian hanya sebagai formalitas semata untuk mendapatkan bukti lulus uji tanpa melihat pentingnya pelaksanaan pengujian yang sesungguhnya untuk memberikan jaminan kelayakan jalan dalam berkendara”.

Tabel 3.3

Data Kendaraan Tidak Lulus Uji di Kabupaten Madiun

Tahun	Jumlah Kendaraan Tdak Lulus Uji
2018	1831
2019	2271
2020	31

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Tata cara pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pasal 11 sampai dengan pasal 13. Pelaksanaan pengujian secara teknis dilakukan oleh pegawai penguji yang telah memiliki kualifikasi ahli dibidangnya. Kendaraan yang telah melalui proses pengujian akan mendapatkan hasil sesuai dengan kondisi kendaraan yang diuji. Kendaraan yang telah berhasil melalui tahapan pengujian akan mendapatkan bukti layak jalan. Prosedur pengujian yang berada di Kabupaten Madiun sendiri sedang mengalami proses uji coba dari sistem lama menjadi sistem baru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supriyadi, AP, M.Si, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun pada hari Jum’at 14 Januari 2022 pukul 10:00 WIB, beliau menyampaikan, “ Saat ini kami sedang melakukan uji coba perubahan sistem pada tahapan proses pengujian kendaraan bermotor dimana kita merubah sistem lama dengan model drive thru. Perubahan ini untuk mempercepat tahapan pelaksanaan pengujian dan mengurangi kontak langsung antara masyarakat pada saat melaksanakan pengujian. Melalui prosedur ini masyarakat yang akan dapat melakukan pengujian tanpa harus turun terlebih dahulu dari kendaraannya tapi terdapat kendala kemarin pada saat uji coba sistem ini. Masalahnya internet yang lemot yang saat ini sedang kami benahi”.

Berdasarkan kedua indikator pembahasan pada dimensi kecukupan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun belum cukup. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang tidak melaksanakan pengujian ulang setelah tidak lolos pada salah satu atau sebagian tahapan pengujian. Uji coba penerapan sistem baru yaitu sistem drive thru sebagai solusi dalam mempercepat dan mengurangi penyebaran virus *Covid-19* juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya masalah jaringan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan sistem baru ini, hal ini menyebabkan adanya keterlambatan pada tahapan pengujian.

### 3.4 Perataan

Dimensi perataan dapat dilihat dari seluruh sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, apakah sudah diberikan secara merata kepada seluruh elemen yang membutuhkan. Adapun indikator pada dimensi perataan adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan perataan sosialisasi pentingnya pengujian.

Indikator pelayanan pengujian kendaraan bermotor lebih menekankan kepada tidak adanya perbedaan dalam melayani, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam pelayanan publik ditekankan pada pemberian kesamaan pelayanan dan kesempatan yang sama untuk merasakan pelayanan. Menurut Bapak Purnomo selaku pemilik kendaraan yang penulis wawancarai pada hari Jum’at, 7 Februari 2021 pada pukul 09.10 beliau mengungkapkan bahwa, “ Alhamdulillah untuk pelayanan pengujian kendaraannya sudah baik, tidak ada yang diistimewakan. Pegawai yang bertugas

juga baik mau membantu dalam proses pendaftaran”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik kendaraan mereka merasakan pelayanan yang diberikan sudah baik dimana petugas membantu para pemilik kendaraan dalam melakukan pengujian seperti membantu dalam mengarahkan berkas yang diperlukan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan wajib uji. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan terkait pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan wajib uji. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan terkait pentingnya pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Supriyadi, AP, M.Si, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun pada hari Jum'at 14 Januari 2022 pukul 10:00 WIB, beliau menyampaikan, “Kita menghimbau kepada masyarakat untuk rajin-rajin melakukan pengujian KIR pada kendaraannya, sebenarnya pengujian kendaraan ini untuk kepentingan mereka pribadi akan tetapi kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengujian secara rutin. Sosialisasi yang dilakukan sekarang terkait penggunaan aplikasi yang mampu mempermudah dan mempercepat jalannya uji KIR, selain itu kita memberikan informasi berupa pesan singkat dalam bentuk whatsapp kepada pemilik kendaraan yang akan habis masa berlaku uji KIR seminggu sebelumnya”. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun memberikan sosialisasi kepada pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian apabila sudah tiba waktunya dengan mengirimkan pesan kepada pemilik kendaraan yang akan berakhir masa kelayakan kendaraan yang mereka miliki, selain itu juga terdapat aplikasi yang mampu digunakan untuk mempercepat proses pengujian kendaraan.

Berdasarkan pembahasan dari kedua indikator pada dimensi perataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun sudah merata. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun juga memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pemilik kendaraan secara merata.

### **3.5 Responsivitas**

Dimensi responsivitas dalam adalah kemampuan organisasi publik untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimensi ini penting untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Adapun indikator responsivitas pada penelitian ini adalah respon masyarakat dan Dinas Perhubungan serta kemudahan pelaksanaan pengujian.

Peran serta masyarakat dan Dinas Perhubungan dibutuhkan dalam memperoleh keberhasilan suatu kebijakan. Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Tuntutan masyarakat akan pelayanan public yang transparan , cepat obyektif, efisien dan profesional semakin kuat. Kritik dan saran merupakan salah satu bentuk respon yang dapat diberikan oleh masyarakat terkait pelaksanaan pengujian. masyarakat bisa memberikan masukan serta kritikan dalam pelaksanaan pengujian, dimana kritikan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada SK Nomor : 188/45/01/35.03.019.001/2017 tentang pelayanan. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun terus melakukan inovasi dalam pelayanan public. SIMPKB merupakan salah satu bentuk responsivitas, transparansi, obyektif serta bentuk profesionalitas yang diberikan kepada masyarakat. Website SIMPKB ini yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sebagai bukti proses transparansi dari pengujian kendaraan bermotor. . Penguji kendaraan membutuhkan peralatan dalam menentukan hasil pengujian kendaraan. Oleh karena itu, penggunaan peralatan haruslah berfungsi secara optimal serta keakurasiannya haruslah memenuhi standar. jika

terdapat kerusakan yang terjadi dalam hal kecil dapat dilakukan perbaikan oleh para pegawai penguji, hal ini dikarenakan para penguji adalah orang yang telah berkompeten dibidangnya. Keseluruhan penguji yang berada di Kabupaten Madiun berasal dari sekolah tinggi yang mempelajari alat dan sarana dalam bidang transportasi, selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun juga memiliki kerjasama dengan pihak ketiga terkait perawatan yang dilakukan secara rutin serta perbaikan pada alat pengujian.

Pemerintah sebagai penyelenggara publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Salah satu inovasi terbaru yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah peluncuran aplikasi SI PINTAR Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. aplikasi ini digunakan dalam hal mempermudah urusan pelaksanaan pengujian kendaraan terutama pada kegiatan administrasi yang terkait dengan pendaftaran kendaraan, dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat mendaftarkan kendaraan dari rumah serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan mengupload dokumen yang telah disediakan pada menu pendaftaran di Aplikasi Si Pintar Dishub Kabupaten Madiun. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun juga mulai mencoba sistem baru dalam mempermudah proses pelaksanaan pengujian, sistem tersebut merupakan sistem dengan model drive thru. Sistem ini telah dilakukan uji coba namun masih terjadi beberapa kendala. Dengan sistem ini harapan nantinya masyarakat yang melakukan pengujian langsung dapat masuk sesuai dengan pendaftaran yang telah mereka lakukan tanpa harus turun terlebih dahulu dari kendaraan mereka.

Berdasarkan pembahasan kedua indikator pada dimensi responsivitas diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pelayanan yang diberikan mulai dari kritik dan saran yang dapat disalurkan oleh masyarakat melalui berbagai cara seperti kotak saran, telepon dan *whatsapp*. Terdapat juga inovasi yang diberikan untuk memenuhi transparansi dengan penggunaan situs web SIMPKB Kabupaten Madiun serta penerapan sistem baru drive thru.

### **3.6 Ketepatan**

Dimensi Ketetapan merupakan bagian dari keputusan yang telah dibuat dalam melaksanakan kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor. Adapun indikator yang dianalisis dalam dimensi ketetapan yaitu ketepatan waktu pengujian dan ketepatan tempat pengujian.

Ketepatan waktu pengujian berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dalam pelaksanaan pengujian bagi kendaraan wajib uji serta lamanya proses pengujian yang berkaitan dengan seberapa cepat proses pengujian dilakukan. Adanya masa pandemi *Covid-19* menyebabkan terjadi penyesuaian pada waktu pelaksanaan pengujian. Perubahan jadwal pelaksanaan pengujian diatur pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Nomor : 551.214/412/402.108/2020. Idealnya pelaksanaan pengujian kendaraan tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk mencari informasi terkait waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang melaksanakan pengujian pada kendaraannya. Rata-rata masyarakat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengujian membutuhkan waktu 30-45 menit dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian. Keterlambatan waktu pengujian dikeluhkan oleh masyarakat pada tahapan administrasi dimana terkadang masih memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tahapan pengecekan kendaraan, hal ini salah satunya disebabkan oleh antrian kendaraan yang melakukan pengujian. Rata-rata unit pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dapat melakukan pengujian pada 30 unit kendaraan setiap harinya. Indikator ketepatan tempat pengujian mengacu pada kestrategisan tempat lokasi pengujian kendaraan bermotor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit pengujian dalam menunjang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Lokasi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun tidak

terletak di tengah wilayah Kabupaten Madiun, selain itu tempat pengujian kendaraan hanya memiliki satu unit belum terdapat UPTD lain terkait tempat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun. Masyarakat masih mengeluhkan lokasi tempat pengujian kendaraan bermotor dimana masyarakat yang berada jauh dari lokasi pengujian membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengujian karena harus menempuh perjalanan yang memakan waktu. Kabupaten Madiun sendiri belum memiliki UPTD lain sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berada pada tempat pengujian. Walaupun berada di pusat kota Kabupaten Madiun, letak pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun ini dapat dikatakan kurang strategis karena berada di wilayah bagian timur Kabupaten Madiun dan belum memiliki UPTD lainnya.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mempunyai tujuan untuk mengurangi permasalahan yang terdapat pada bidang transportasi. Pengujian kendaraan ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam rangka pelayanan publik, akan tetapi pelaksanaan pengujian hanya terbatas pada kendaraan berjenis angkutan orang dan barang belum sampai kepada kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada. Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu pengujian kendaraan ini mampu mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya dari faktor teknis kendaraan, dimana transparansi dan totalitas dalam bekerja sangat diperlukan bagi para pegawai teknis pengujian kendaraan karena dapat menyangkut nyawa manusia. Disisi lain pemerintah Kabupaten Madiun telah memberikan beberapa inovasi dan terobosan baik untuk mempermudah pelaksanaan pengujian, mempercepat serta sebagai bukti transparansi sebagai tuntutan dalam pelayanan publik diantaranya pembuatan aplikasi Si-Pintar Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, pembuatan website SIMPKB, inovasi layanan pengingat melalui pesan otomatis di whatsapp, penerapan sistem baru drive thru serta kebijakan lainnya dalam memperlancar proses pengujian.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini memberikan dampak positif. Akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya salah satunya karena faktor kurangnya sumber daya pegawai (SDM) teknis pengujian seperti temuan dari Laki dan Giffary (Laki Natika dan Giffary Nursyah Putri, 2021). Temuan lain juga seperti yang dikemukakan oleh Refita dkk (Refita Syafitri, Ike Rachmawati dan Dine Meigawati, 2020) yaitu sebagian besar pemilik kendaraan tidak mengetahui manfaat dan tujuan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun yaitu kurangnya jumlah pegawai terutama pegawai teknis pengujian kendaraan, sosialisasi yang perlu ditingkatkan kembali, permasalahan dalam penerapan sistem drive thru yaitu pada jaringan internet serta tempat pengujian yang kurang strategis.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik apabila dilihat pada dimensi efektivitas, perataan dan responsivitas, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mampu memenuhi target pengujian, memiliki inovasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengujian serta sistem prosedur baru yaitu drive thru. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dialami pada dimensi efisiensi, efektivitas dan ketepatan. Kendala yang dialami pada jumlah SDM Pegawai yang masih kurang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan

pengujian, kendala pada penerapan sistem baru dan aplikasi serta belum adanya UPTD pengujian lain di Kabupaten Madiun.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwa
- Agustino, Leo. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Akbar, Firyal dan Widya Kurniati Mohi. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo : Ideas Publishing
- Daniel, L. Stufflebeam dan Antony J. Shinfield. 2007. Evaluation Theory, Models and Applications. San Fransisco : Jossey Bass
- Dunn, N.William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fatimah, Siti. 2019. Pengantar Transportasi. Ponorogo : Myria Publisher
- Hikmawati, Fenti. 2017. Metodologi Penelitian. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho. 2009. Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Moeleong, J. Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta
- Soesilo, Nining I. 1999. Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota. Jakarta : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tamin, Ofyar Z. 1997. Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung : Penerbit ITB
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus. Jakarta : CAPS PT Buku Seru
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perhubunhan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Uji Type Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perizinan Angkutan Penumpang Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Luki Natika, Giffary Nursyah Putri.2021.Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umumdan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Refita Syafitri, Ike Rachmawati, Dine Meigawati.2021.Implemntasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Novianna Munawar Noor, Fania Mutiara Safitri.2021. Implemenrasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

<https://sera.astra.co.id/news/2020/02/5-negara-dengan-sistem-transportasi-terbaik-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>

7 Negara dengan Sistem Transportasi Terbaik di Dunia (cekaja.com)

Sistem Transportasi Singapura Terbaik di Dunia (kompas.com)

<https://www.suara.com/otomotif/2021/05/31/170000/mpr-kendaraan-bermotor-jadi-penyumbang-terbesar-polusi-udara>

4 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia Tahun 2021, Indonesia Termasuk? - Adjar (grid.id)

Kapolres Madiun : Angka Laka Lantas Tergolong Tinggi, Dibutuhkan Kepedulian Semua Pihak - Kabar Daerah Jawa Timur

